

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	FORUM	22	25-8-2002

Seandainya Kepri Jadi Provinsi



Dulu, penduduk Kepulauan Riau bisa hidup makmur dari pasir dan sumber daya alam. Tapi kini, rezeki itu cuma menguntungkan petinggi Jakarta?

Setelah menunggu setahun, masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya cuma bisa gigit jari. Akhir Juli lalu, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Kepri hingga akhir Agustus nanti. Padahal, pengesahannya tinggal menghitung hari.

Ditengarai, kegagalan itu berasal dari para petinggi Provinsi Riau yang masih tak berkenan Kepri memisahkan diri. Gubernur Riau Saleh Djasit, begitu pula DPRD Riau, tak memberikan persetujuan, bahkan menentang aspirasi yang terus tumbuh di Kepulauan Riau. Berbeda dengan pembentukan Provinsi Banten dan Bangka Belitung yang lancar, pembentukan Provinsi Kepri mencautkan banyak pertentangan. Malah, beberapa daerah yang masuk dalam wilayahnya, seperti Batam, Karimun, dan Natuna, juga tak berkenan. Mereka menganggap Kepri belum saatnya menjadi provinsi. Sebab, untuk pembentukan daerah otonom saja mereka masih harus banyak belajar.

Padahal, usulan pembentukan Provinsi Kepri kabarnya ditukangi para politisi dari Jakarta. Secara kasat mata, bisnis penambangan pasir adalah salah satu alasannya. Walaupun telah berlangsung belasan tahun, bisnis ini ternyata tak pernah redup. Negeri tetangga, Singapura, masih memerlukan 1,8 miliar meter kubik pasir untuk reklamasi pantainya hingga 2010. Dari 235 juta meter kubik ekspor pasir sepanjang tahun, cuma 43 juta meter kubik yang resmi. Sisanya, masuk kantong pengusaha, atau disikat penambang liar.

Nah, sejak munculnya Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 33/2002 tentang Pengen-

dalian dan Pengusahaan Pasir Laut, para kepala daerah jadi ketiban rezeki. Dalam kepres itu, para pengusaha wajib meminta restu gubernur atau bupati. Rekomendasi dua pejabat itu diwajibkan untuk mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sejak disahkan Mei lalu, setidaknya

Padahal, jumlahnya lebih dari seratus KP. Bila diperpanjang, tentu harus mengeluarkan duit dari kocek lagi.

Tapi, sekali lagi, yang diuntungkan adalah pemain bisnis dari Jakarta. Disebut-sebut Ricardo Gelael dan Iskandar Di Nata yang sudah lama bergelut bisnis pasir di sana. Ditambah beberapa tokoh nasional yang dekat de-



PROTES MENDUKUNG OTONOMI KEPRI. Ditukangi pejabat Jakarta.

20 permohonan izin pertambangan pasir sudah mampir ke meja Gubernur Riau, Bupati Karimun, Wali Kota Batam, dan Bupati Kepri.

Dengan menjadi provinsi tersendiri, maka tata niaga pasir bisa disusun ulang. Dengan menyokong Kepri, para pengusaha bisa aman berinvestasi sebagai pemasok pasir untuk Singapura. Selain itu, izin kuasa penambangan (KP) pasir yang sebelumnya dimiliki pemerintah provinsi juga ikut berpindah ke Kepri. Nilainya tak kurang dari Rp 1,3 miliar per KP.

ngan Bupati Kepri, Huzrin Hood.

Bila dibandingkan dengan provinsi baru seperti Banten, Bangka, Belitung, dan Gorontalo, sumber daya alam Kepri memang cukup berlimpah. Yang bisa diandalkan, di antaranya, bahan tambang dan galian seperti bauksit di Pulau Bintan, dengan perkiraan deposit 3.515 juta ton; batu granit di Lingga, Bintan, dan Sinkep dengan perkiraan deposit 873 juta meter kubik.

Belum lagi pasir laut dan darat untuk pa-

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

sokan ke Singapura. Pada 2001, komoditas pasir itu menyumbang Rp 90 miliar dari 30 juta meter kubik pasir ekspornya. Kepri juga memiliki tambang timah di Pulau Singkep dengan perkiraan deposit 200 ribu ton. Lantas, ada gas di Natuna dengan perkiraan deposit 46 triliun kaki kubik. Untuk perikanan, Kepri juga menghasilkan produk 133.427,6 ton per tahun atau 32,72 persen dari total produksi Riau.

Sektor pariwisata juga lumayan. Misalnya, pariwisata laut dan pantai di Lagoi yang memberikan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 40 miliar per tahun. Itu belum termasuk potensi wisata di Pulau Penyengat, Pulau Rempang, Galang, dan Kota Batam. Selain itu, jumlah industri menengah dan besar yang beroperasi di Batam mencapai 230 dari total 368 pabrik di seluruh Riau.

Tapi, meskipun berlimpah, dibandingkan dengan Riau, sumber daya alam Kepri masih kalah. Sebab, minyak bumi yang tersebar di Kabupaten Siak, Bengkalis, Pelawan, Kampar, dan Dumai memberikan hasil tak kurang dari Rp 59,14 triliun atau 60 persen dari total produksi nasional. Riau daratan juga punya bahan galian pasir, batu bara, hutan produksi seluas 3,84 juta hektare, serta lima sungai yang bisa dimanfaatkan untuk PLTA dan pelayaran.

Ditambah lagi, pengelolaan Kepri yang belum optimal. Tiga wilayah Kepri—seperti Batam, Karimun, dan Natuna—belum menunjukkan hasil memadai. Untuk tahun ini, Kepri diproyeksikan menyumbang ke Riau daratan sebesar Rp 82,267 miliar. Sebaliknya, penerimaan Kepri yang berasal dari Riau daratan jauh lebih besar, yakni Rp 482,503 miliar, itu pun masih ditambah dengan Rp 137 miliar berupa alokasi proyek pembangunan Provinsi Riau. Artinya, Kepri menerima Rp 619,503 miliar dari Riau dan cuma menghasilkan Rp 82,267 miliar dari hasil sendiri.

Apalagi, jika masalah klasik sumber daya manusia juga menjadi hitungan. Jangankan berbicara kualitas, untuk kuantitas saja kedodoran. Kabupaten Karimun yang baru dimekarkan saja cuma terisi 148 eselon dari jumlah 614 eselon yang seharusnya ada untuk 22 unit di tingkat dua. Untuk provinsi dibutuhkan sekitar 700—1.000 eselon pegawai negeri sipil (PNS) di 11 unit yang seharusnya ada. Selain itu, masalah geografis bisa pula menjadi kendala terbesar. Sebab, penduduknya tersebar di gugusan pulau yang lebih dari seribu buah, dengan luas 10.595 kilometer persegi. Bisa jadi, para pejabat pemerintah cuma bisa bertemu beberapa bulan sekali.